

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun banyak terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata atas objek kekayaan BUMN karena Pengadilan masih menafsirkan harta kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang tunduk pada undang-undang Perbendaharaan Negara.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kekayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan, bagaimana status hukum kekayaan BUMN yang menjadi objek Gugatan Perkara Perdata dan bagaimana analisis hukum terhadap penundaan eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara dalam putusan Mahkamah Agung No. 4008 K/ Pdt/ 2001 antara PT. Pelabuhan Indonesia I Belawan dengan Sakdymah dkk.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan. Analisa terhadap data dilakukan secara analisa kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan tentang Kekayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kekayaan BUMN merupakan objek Gugatan Perkara Perdata. Ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara. Hal ini didasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) jilid Pasal 1 angka (10) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, serta Pasal 1 angka (1) jo Pasal 7 ayat (7) huruf a UU PT juga prinsip hukum '*separate legal entity*', kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero merupakan harta kekayaan Persero. Analisis terhadap tertundanya eksekusi Putusan Mahkamah Agung yang merujuk ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 10, 11 dan 50 maka terdapat pertentangan hukum (*antinomie*) aturan hukum. Untuk menyelesaikan '*antinomie*' aturan hukum Pengadilan harus menggunakan '*asas preferensi hukum*', yaitu: *Lex superior* derogat *legi inferiori* (perundang-undangan yang baru mengalahkan perundang-undangan yang lama), dan *Lex spesialis* derogat *legi generalis* (perundang-undangan yang khusus mengalahkan perundang-undangan yang umum). Ada beberapa sikap berkaitan dengan '*antinomie*', yaitu: (1) pengingkaran (*disavowal*), (2) reinterpretasi, (3) pembatalan (*invalidation*), dan (4) pemulihan (*remedy*).

Kata Kunci : Eksekusi, Perkara Perdata, Aset BUMN

ABSTRACT

State Owned Enterprises (SOE) is a business entity wholly or largely owned by the state capital through direct investments from sovereign wealth pengaturanya separated and regulated in Law No. 19 Year 2003 on SOEs and the Law No. 40 Year 2007 About the Company Limited. But there are many cases of failure by not executed a civil suit over the object of wealth owned by the Court was interpreting SOE's property is state property that is subject to the law of the State Treasury.

The problem in this thesis is how the arrangement richness of State Owned Enterprises as a form of wealth separated state, how the status of state property law which is the object and how the Civil Lawsuit Case law analysis of the delay in the execution of asset-Owned Enterprises in the judgment of the Supreme Court No. 4008 K / Rev / 2001 between PT. I Belawan port of Indonesia with Sakdymah et al.

This research is a descriptive normative analysis. Sources of data derived from the primary, secondary and tertiary collected by the research literature. The analysis of the data conducted qualitative analysis with deductive approaches.

Results showed regulation of Wealth Owned Enterprises as a form of wealth separated state regulated in Law Number 19 Year 2003 regarding SOEs and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Wealth Enterprises is the object Civil Lawsuit Case. When the state capital in the form of shares included in the Persero of wealth separated state, for the sake of intellectual property law becomes Persero. No longer the nation's wealth. This is based on Article 1 (1) and figure (2) jis Article 1 (10) and Article 4 paragraph (1) of state-owned enterprises, as well as Article 1 (1) in conjunction with Article 7, paragraph (7) letter a of Law PT also principles of law 'separate legal entity', wealth separated state and are included as capital assets Persero Persero. Consequently all the wealth obtained either through the inclusion of the country as well as those derived from business activities Persero, by law, a wealth Persero itself. Analysis of the Supreme Court delayed the execution of the provisions referring to Law. 1 of 2004 on State Treasury, Article 1 number 10, 11 and 50 then there is a conflict of laws (antinomie) the rule of law. This is an issue that the Supreme Court ruling execution can not be carried out above. To complete the 'antinomie' rule of law courts should use a "preference principle of law", namely: (1) Lex superior derogat legi inferiori (legislation higher higher level defeating legislation below), (2) Lex posteriori derogat legi priori (new legislation which beat the old legislation), and (3) Lex derogat legi generali specialist (special legislation defeated general legislation). There are several related attitudes 'antinomie', namely: (1) denial (disavowal), (2) reinterpretation, (3) revocation (invalidation), and (4) recovery (remedy).

Key Words: Execution, Civil Case, SOE Assets